

APAKAH KINERJA KEUANGAN DAERAH MENGGAMBARAKAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

Norsain¹, Mohammad Rofik²

Universitas Wiraraja
norsain@wiraraja.ac.id

Received : Oct 19th 2021 | Revised : Nov 17th 2021 | Accepted : Jan 2th 2022

ABSTRACT

This study is to examine the financial performance of district / city governments affecting poverty in East Java. The data used in this study is research data, which is a combination of time series data with cross section data with a research sample of 38 districts/ cities for six years of observation from 2013 to 2018. Fixed Effect Model (FEM) as the chosen model. Variable X1, the degree of decentralization has an effect on variable Y. These results indicate that the degree of decentralization has a significant negative effect on poverty. Variable X2 regional financial dependence has a positive effect on variable Y poverty. Variable X3 regional financial independence has no effect on variable Y poverty. Variable X4 PAD effectiveness does not affect variable Y poverty. Variable X5 PAD efficiency has no effect on variable Y poverty. Simultaneously the variable degree of decentralization, regional financial dependence, regional financial independence, effectiveness and efficiency has a significant effect on the poverty variable. R-squared is 0.985112, that variable Y poverty is explained by variable X regional financial performance of 98.51%. While the remaining 1.49% is explained by other factors that are not included in the model

Keywords : *financial performance, poverty*

PENDAHULUAN

Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (GDP) yang tinggi semata, tetapi lebih luas daripada itu. Pembangunan nasional yang diselenggarakan secara serentak melalui semangat otonomi daerah mengacu pada tiga strategi yaitu *Pro Growth*, *Pro Job*, dan *Pro Poor* yang semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu memberantas kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sadik, 2014).

Indonesia telah mengalami perubahan yang fundamental sejak tahun 2001 terkait mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan itu adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai amanat dari UU Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini memberikan kewenangan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan pembangunan atas dasar potensi yang dimiliki. Implikasi kewenangan otonomi daerah menuntut daerah agar melaksanakan pembangunan di segala bidang, sebab yang menentukan maju mundurnya suatu daerah adalah komponen masyarakat daerah itu sendiri.

Suatu daerah yang otonom, dituntut memiliki kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Suatu daerah dikatakan mandiri dapat diidentifikasi dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Sehingga tujuan otonomi daerah dapat

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu instrument kebijakan yang penting dalam melaksanakan otonomi daerah adalah APBD. APBD tersebut sebagai alat mengatur distribusi anggaran. Peningkatan PAD merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Sehingga jika PAD mempunyai kontribusi yang besar terhadap APBD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Menurut Mudrajad ada tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan untuk mengukur pembangunan suatu daerah atau negara, yaitu a) apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, b) apa yang terjadi terhadap pengangguran, dan c) apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. Ketiga masalah pokok tersebut saling berkaitan antara masalah yang satu dan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan disebabkan banyaknya pengangguran yang berdampak pada ketimpangan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, bila salah satu dari tiga hal tersebut mengalami gangguan atau goncangan, maka akan berdampak kepada dua hal yang lainnya.

Angka kemiskinan di Jawa Timur mendapat perhatian khusus karena garis kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan dan secara nasional tertinggi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2018 tercatat mencapai 218.160 jiwa atau 20,16 % dibanding total penduduk Jawa Timur. Jumlah tahun 2017 mencapai jumlah 211.920 jiwa atau 19,62 % Dengan kata lain jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami peningkatann 6.240

atau 0,54 %.

Pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan. Banyak dampak (*multieffect*) yang dihasilkan jika kemiskinan suatu daerah tinggi diantaranya; penyakit sosial masyarakat (kriminalitas, pengemis), rendahnya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan dan mempunyai posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian internal maupun keterkaitan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kinerja yang berhubungan dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yang berupa perbandingan antara komponen-komponen yang ada di anggaran.

Kinerja keuangan yang ada dalam penelitian ini terdiri: derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD. Dimana rasio-rasio kinerja keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui dampak mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Jawa Timur

METODE PENELITIAN

. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengakses data kemiskinan dari www.jatimbps.co.id dan laporan keuangan pemerintah daerah se Jawa Timur dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 sampai 2018 dari dan data kemiskinan 2013-2018

dengan jumlah populasi 38 kabupaten dan kota yang sekaligus sebagai sampel (sampel jenuh). Data penelitian tersebut dianalisis uji pengaruh dengan menggunakan *software views*.

Alat analisis menggunakan analisis regresi data panel dengan melakukan pemilihan model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random*

Effect Model, kemudian dilanjutkan uji asumsi klasik. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni, Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji signifikansi yang digunakan yaitu, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model

Tabel 1 Pemilihan Model

No		F-statistic	R-squared	Prob(F-statistic)	Prob.
1	<i>Common Effect Model</i>	18.26416	0.291461	0.000000	
	C				0.0088
	X1				0.0000
	X2				0.0000
	X3				0.0000
	X4				0.8849
2	<i>Fixed Effect Model</i>	291.4579	0.985112	0.000000	
	C				0.0000
	X1				0.0000
	X2				0.0000
	X3				0.2024
	X4				0.8108
3	<i>Random Effect Model</i>	10.78141	0.195381	0.000000	
	C				0.0000
	X1				0.0000
	X2				0.0000
	X3				0.2080
	X4				0.8119
	X5				0.4218

Uji Chow digunakan untuk memilih model *Fixed Effect* atau *Common Effect* mana yang lebih tepat digunakan dalam estimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Nilai probabilitas, untuk cross section F, jika nilainya $> 0,05$ maka terima H0 model yang dipilih adalah CE, tetapi jika prob cross section $F < 0.05$ maka tolak H0 model yang terpilih adalah FE. Nilai probability adalah 0.0000 sehingga $F < 0.05$ maka model yang dipilih adalah FE. Uji lain adalah dengan membandingkan F

Statistik dengan F tabel sebagaimana berikut:

$$f = \frac{(S.SE1 - SSE2)/(38 - 1)}{SSE2/(NT - N - K)}$$

SSE1 = Sum Square Error dari model *Common Effect*

SSE2 = Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

N = Jumlah Perusahaan (cross section)

Nt = Jumlah cross section x time series

K = jumlah variabel independen

F tabel = [α : df (n-1, nt-n-k)]

= 5%;(37,228-38-5)

= 5% ;(37,185)

= 1.46

α = tingkat signifikansi yang dipakai

n = Jumlah perusahaan (cross section)

nt = jumlah cross section x jumlah time series

k = jumlah variabel independen

$$f = \frac{(3788.553 - 79.60528)/(38 - 1)}{79.60528/(38.6 - 38 - 5)}$$

$$f = \frac{100.241830}{0.43029881}$$

F= 232.958650

F-tabel= 5%;(38-1,38.6-38-5)

= 5%;(37,228-38-5)

= 5% ;(37,185)

Tabel 2 Uji Moltikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	0.737211	0.548766	0.001996	0.056660
X2	0.737211	1.000000	-0.136631	-0.004235	0.004250
X3	0.548766	-0.136631	1.000000	0.002562	0.085675
X4	0.001996	-0.004235	0.002562	1.000000	-0.006539
X5	0.056660	0.004250	0.085675	-0.006539	1.000000

Dari tabel diatas dapat dilihat hubungan antar variable nilai koefisien korelasinya dibawah 0,80 dapat disimpulkan bahwa

= 1.46

Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel (232.958650 > 1,46). Sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adala *Fixed Effect Model*

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara FE dan RE. jika nilai probabilitas cross section random > 0,05 maka model yang digunakan adalah RE, tetapi jika probabilitas cross section random < 0,05 maka model yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model*. Dari hasil output eviews diatas, hasil probabilitas cross section random adalah 0,00000 lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang dipakai adalah *Fixed Effect Model*

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

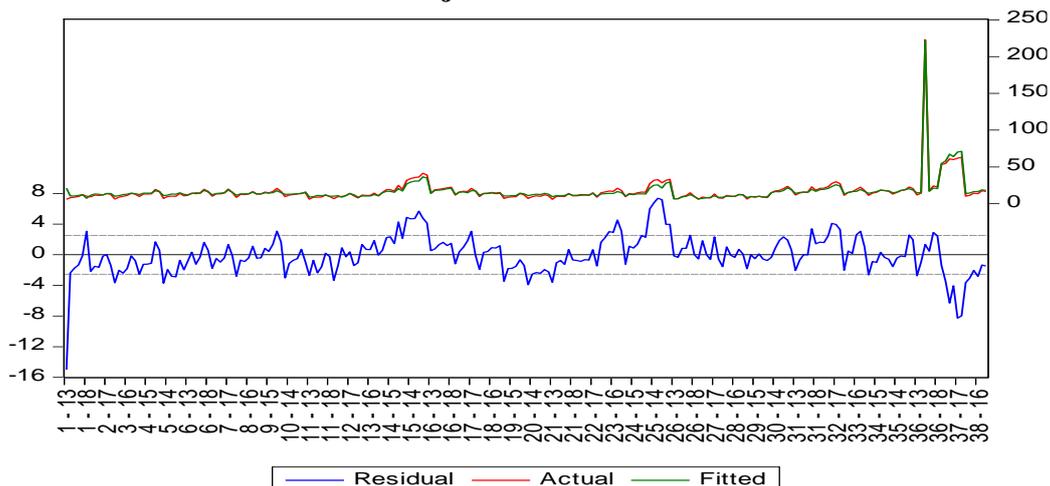
data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah data yang dihasilkan membentuk pola tertentu atau tidak. Jika tidak terbentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sebaliknya jika terbentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas



Hasil output eviws di atas tidak terjadi heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, atau residualnya cenderung konstan.

Uji Signifikansi

Uji T (Uji Parsial)

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui setiap variabel independen dapat digunakan untuk mendeteksi variabel

dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas:

H0 = variable bebas tidak mempengaruhi variable tak bebas

H1 = variable bebas mempengaruhi variable tak bebas

jika probabilitas >5%, maka H0 diterima, jika probabilitas <5% maka H0 ditolak (H1 diterima). Berikut hasil output eviws.

Tabel 4 Output eviws

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.90446	0.630641	17.29108	0.0000
X1	-0.126145	0.029085	-4.337169	0.0000
X2	0.025633	0.005943	4.313261	0.0000
X3	0.024088	0.018829	1.279300	0.2024
X4	0.000722	0.003012	0.239746	0.8108
X5	0.003075	0.003681	0.835361	0.4046

Dari hasil uji t, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel X1 Derajat Desentralisasi

Dari tabel diatas signifikansi sebesar 0,0000, karena nilai signifikansinya < dari 0,05 maka berarti terima H0 dan tolak H1. Variable X1 berpengaruh pada variable Y.

Hasil ini menunjukkan bahwa Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi PAD semakin tinggi pula derajat desentralisasi. Jika PAD semakin tinggi maka kemampuan keuangan daerah untuk

membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan semakin besar juga. Semakin tingginya PAD menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin pesat sehingga secara bertahap dapat menurunkan kemiskinan. Penyediaan sumber-sumber pendapatan oleh pemerintah daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi ekonominya melalui pembangunan menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan menaikkan PAD. Sumber utama PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba daribadan usaha milik daerah dan sumber lain.

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks dan dari dimensi ekonomi penyebab utama kemiskinan adalah ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack income and asset*). Ketidakcukupan pendapatan dan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja. Suatu daerah yang PADnya meningkat, ekonomi di daerah tersebut juga telah meningkat dan kesempatan kerja juga meningkat sehingga ketidakcukupan pendapatan dapat diatasi yang pada gilirannya akan menurunkan kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Smith dalam Widiyanto, bahwa timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor nantinya akan meningkatkan daya tarik terhadap pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi dan memperluas pasar kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi lebih pesat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendapat lain penyebab kemiskinan adalah Sharp *et.all* dalam Kuncoro (2006) menjelaskan penyebab kemiskinan berdasarkan perspektif ekonomi 1). Secara

mikro, kemiskinan karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya dan kualitasnya rendah 2). Kemiskinan ada karena kualitas SDM yang rendah 3). Kemiskinan ada akibat perbedaan akses dalam modal.

Mengatasi fenomena kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan sumber penerimaan PADnya dengan cara mendorong perekonomian di daerah untuk terus tumbuh berkembang. Daerah-daerah harus terus berusaha menambah sumber pendapatan dengan terus menggali potensi daerah yang belum dikelola secara maksimal.

Variabel X2 Ketergantungan Keuangan Daerah

Dari tabel 4 diatas signifikansi sebesar 0,000, karena nilai signifikansinya < dari 0,05 maka berarti tolak H0 dan terima H1. Variabel X2 ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif pada variabel Y kemiskinan.

Transfer fiskal antar pemerintah pusat ke daerah atau pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota terdiri atas hibah dan bagi hasil mendominasi sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota. Tujuan utama transfer adalah untuk pemerataan dan untuk efisiensi yang dapat mendorong daya beli pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat menekan kesenjangan fiskal antar pemerintah kabupaten/kota. Akhirnya dengan tranfer fiskal pemerintah kabupaten/kota terdorong untuk meningkatkan penerimaannya sehingga perekonomian daerah dapat meningkat dan pada gilirannya dapat mengatasi masalah

kemiskinan di daerahnya.

Transfer yang dilakukan pemerintah pusat sejak tahun 2001 dari hasil penelitian ini telah menimbulkan ketergantungan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Transfer belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sehingga masalah kemiskinan belum dapat diatasi. Pemerintah daerah di Jawa Timur belum dapat memaksimalkan pendapatan transfer dari pusat atau provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga ketergantungan terhadap transfer menjadi berkurang dan PAD terus meningkat.

Strategi mengatasi kemiskinan di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur adalah dengan mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada pusat yaitu meningkatkan PADnya. Masih mendominasi pendapatan transfer dari seluruh pendapatan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur menjadikan Jawa Timur belum keluar dari masalah kemiskinan.

Variabel X3 Kemandirian Keuangan Daerah

Dari table diatas signifikansi sebesar 0.2024, karena nilai signifikansinya > dari 0,05 maka berarti terima H₀ dan tolak H₁. Variable X3 kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan.

Kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur adalah keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tetapi tidak dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan. Kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur tidak bisa menjadi stimulus dalam mengatasi kemiskinan. Persoalan kemiskinan di Jawa Timur tidak dapat

dikaitkan dengan kemandirian keuangan daerah, sebab persoalan kemiskinan adalah persoalan ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian keuangan daerah tidak menjadi indikator keberhasilan ekonomi di daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah belum tentu menyentuh masalah kesempatan dan peluang kerja yang luas di daerah tersebut yang pada gilirannya akan mengatasi masalah ketidakcukupan pendapatan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ni Luh Nana dan Niken NingTias yang hasilnya rasio kemandirian berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Variabel X4 Efektifitas PAD

Dari table diatas signifikansi sebesar 0.8108, karena nilai signifikansinya > dari 0,05 maka berarti terima H₀ dan tolak H₁. Variable X4 efektifitas PAD tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan.

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Efektifitas PAD tidak mempengaruhi penurunan atau peningkatan kemiskinan di daerah. PAD yang efektif diukur dari tingkat pencapaian anggaran, tidak dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan perekonomian di daerah.

Efektifitas PAD adalah keberhasilan kinerja daerah dalam upaya mencapai tujuan anggaran, berarti hanya keberhasilan kinerja keuangan daerah bukan keberhasilan daerah dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Efektifitas

PAD tidak dapat menjadi indikator bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber daya lokal. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan atau menambah barang dan jasa publik tertentu. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak mempunyai kebebasan dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan perekonomian di daerah yang berdampak pada penurunan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Luh Nana yang hasilnya rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Tias (2016).

Variabel X5 Efisiensi PAD

Dari table diatas signifikansi sebesar 0.4046, karena nilai signifikansinya > dari 0,05 maka berarti terima H0 dan tolak H1. Variable X4 efisiensi PAD tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan.

Dalam menjalankan pemerintahan, suatu daerah di tuntut melaksanakan kegiatan secara efisien. Menghitung rasio efisiensi PAD untuk mengukur kinerja

pemerintah daerah agar diketahui apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terlaksana secara efisien atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan PAD di daerah tidak memberikan efek stimulatif dalam mengatasi kemiskinan di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebagaimana Efektifitas PAD, efisiensi PAD dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan atau menambah kepemilikan barang dan jasa publik. Efisiensi PAD belum menyentuh sektor yang mendorong peningkatan perekonomian di daerah. Rambu-rambu yang telah digariskan oleh pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah minim kreasi dalam mengarahkan PAD untuk menumbuh kembangkan perekonomian di daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Luh Nana dan sejalan juga dengan hasil penelitian Tias (2016) yang hasilnya rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5 Uji F

R-squared	0.985112	Mean dependent var
Adjusted R-squared	0.981732	S.D. dependent var
S.E. of regression	0.655972	Akaike info criterion
Sum squared resid	79.60528	Schwarz criterion
Log likelihood	-203.5598	Hannan-Quinn criter.
F-statistic	291.4579	Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)	0.000000	

Pengujian ini dilakukan untuk

mengetahui secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen dengan derajat kepercayaan sebesar 5% menggunakan rumus sebagai berikut.

H0 = variabel bebas tidak mempengaruhi secara simultan variable takbebas
 H1 = variabel bebas mempengaruhi secara simultan variable tak bebas.

Berdasarkan probabilitas: jika probabilitas >5%, maka H0 diterima. Jika probabilitas <5% maka H0 ditolak (H1 diterima).

Berdasarkan output eviews diatas dapat dilihat bahwa f statistic probabilitasnya adalah 0,0000 lebihkecildari 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1, secara simultan variable independen berpengaruh secara signifikan pada variable dependen.

Pengelolaan keuangan daerah untuk program-program pembangunan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga daerah dapat mengatasi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan banyak penciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi keluarga miskin, sehingga keluarga miskin dapat meningkat pendapatannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dijadikan stimulus dalam mengatasi kemiskinan di daerah.

Penyebab kemiskinan menurut (Jayadi & Brata, 2016) bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) mengatakan:” *a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Luh Nana dan sejalan juga dengan hasil penelitian Tias (2016) yang hasilnya kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil output eviews R-squared sebesar 0.985112, bahwa variable Y kemiskinan dijelaskan secara serentak oleh variable X kinerja keuangan daerah sebesar 98,51%. Sedangkan sisanya sebesar 1,49% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak masuk kedalam model.

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	Std. Error
C	10.90446	0.630641
X1	-0.126145	0.029085
X2	0.025633	0.005943
X3	0.024088	0.018829
X4	0.000722	0.003012
X5	0.003075	0.003681

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut:

Estimation Command:

```
=====
LS(CX=F) Y C X1 X2 X3 X4 X5
```

Estimation Equation:

```
=====
Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + C(5)*X4 + C(6)*X5 +
[CX=F]
```

Substituted Coefficients:

```
=====
Y = 10.9044648635 - 0.126144730954*X1 + 0.0256329108619*X2 +
0.0240875428482*X3 + 0.000722078426947*X4 + 0.0030747496779*X5 +
[CX=F]
```

0.985112

Artinya, ketika derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efisiensi dan efektifitas PAD bernilai Nol, maka nilai kemiskinan sebesar 10.90447. Koefisien b1 = 0.1261448, artinya jika variable derajat desentralisasi ditingkatkan 1, maka kemiskinan akan menurun 0.1261448. Koefisien b2 = 0.02563291, artinya jika variabel derajat desentralisasi nilainya tetap dan variabel ketergantungan keuangan daerah ditingkatkan 1, maka kemiskinan akan meningkat 0.02563291. Koefisien b3 = 0.0240875, artinya jika derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah nilainya tetap dan variable kemandirian keuangan ditingkatkan 1, maka kemiskinan akan meningkat 0.0240875.

Koefisien b4 = 0,0007220, artinya jika derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan kemandirian keuangan

daerah nilainya tetap dan variable efektivitas PAD ditingkatkan 1, maka kemiskinan akan meningkat 0,0007220. Koefisien b5 = 0.00307475, artinya jika derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD nilainya tetap dan variable efisiensi PAD ditingkatkan 1, maka kemiskinan akan meningkat 0.00307475.

KESIMPULAN

1. Variable X1 derajat desentralisasi berpengaruh pada variable Y. Hasil ini menunjukkan bahwa Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi PAD semakin tinggi pula derajat desentralisasi. Jika PAD semakin tinggi maka kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan

roda pemerintahan semakin besar juga. Semakin tingginya PAD menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin pesat sehingga secara bertahap dapat menurunkan kemiskinan depan.

2. Variable X2 ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif pada variable Y kemiskinan. Transfer fiskal antar pemerintah pusat ke daerah atau pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota terdiri atas hibah dan bagi hasil mendominasi sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota. Transfer yang dilakukan pemerintah pusat sejak tahun 2001 dari hasil penelitian ini telah menimbulkan ketergantungan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Transfer belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sehingga masalah kemiskinan belum dapat diatasi. Pemerintah daerah di Jawa Timur belum dapat memaksimalkan pendapatan transfer dari pusat atau provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga ketergantungan terhadap transfer menjadi berkurang dan PAD terus meningkat
3. Variable X3 kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan. Kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur adalah keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tetapi tidak dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan. Persoalan kemiskinan di Jawa Timur tidak dapat dikaitkan dengan kemandirian keuangan daerah, sebab persoalan kemiskinan adalah persoalan ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian keuangan daerah tidak

menjadi indikator keberhasilan ekonomi di daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah belum tentu menyentuh masalah kesempatan dan peluang kerja yang luas di daerah tersebut yang pada gilirannya akan mengatasi masalah ketidakcukupan pendapatan

4. Variable X4 efektifitas PAD tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Efektifitas PAD tidak mempengaruhi penurunan atau peningkatan kemiskinan di daerah. PAD yang efektif diukur dari tingkat pencapaian anggaran, tidak dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan perekonomian di daerah. Efektifitas PAD adalah keberhasilan kinerja daerah dalam upaya mencapai tujuan anggaran yaitu pelayanan dan menambah kepemilikan barang dan jasa publik, bukan keberhasilan daerah dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Variable X5 efisiensi PAD tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan. Dalam menjalankan pemerintahan, suatu daerah dituntut melaksanakan kegiatan secara efisien. Hasil penelitian ini bahwa efisiensi pengelolaan PAD di daerah tidak memberikan efek stimulatif dalam mengatasi kemiskinan di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebagaimana Efektifitas PAD, efisiensi PAD dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan atau menambah kepemilikan barang dan

jasa publik. Efisiensi PAD belum menyentuh sektor yang mendorong peningkatan perekonomian di daerah.

6. Secara simultan variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi berpengaruh secara signifikan pada variable kemiskinan. Pengelolaan keuangan daerah untuk program-program pembangunan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga daerah dapat mengatasi kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, P. N. L. . A. D. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–497.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007. *Jurnal Ganec Swara*, 4(3).
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamzah, A. (2008). Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). *Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1).
- Hanafi, Imam; Mugroho, T. L. (2009). *Desentralisasi Fisikal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Jayadi, D. S., & Brata, A. G. (2016). Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012. *MODUS*, 28(1), 91. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i1.669>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nanga, M. (2006). *Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Institut Pertanian Bogor.
- Sadik, J. (2014). *Profil Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumenep*. Maret (Vol. 9). <https://doi.org/10.21107/MEDIATR END.V9I1.770>
- Suradi. (2017). Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial. *SosioKonsepsia*, 12(3), 1–11. <https://doi.org/10.33007/SKA.V12I3.636>
- Tias, N. N. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2013)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (Vol. 3).

Tiebout, C. M. (1961). *An Economic Theory of Fiscal Decentralization* (Vol. Publisher). Princeton University Press.

Usman. (2006). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Tingkat Kemiskinan*. Institut Pertanian Bogor.